

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kerja sama seperti yang didefinisikan oleh Robert Keohane dan sejumlah ahli, yakni terjadi ketika seorang aktor melakukan penyesuaian perilaku dengan opsi yang diantisipasi oleh orang lain, yaitu dengan melalui proses koordinasi kebijakan. Pendapat terkait kerja sama ini terdiri dari dua unsur penting. Pertama, dapat diasumsikan bahwa setiap perilaku aktor lain mengarah pada beberapa tujuan. Hal ini menjadi perilaku rasional dalam melihat kerja sama yang memiliki arah dan tujuan tertentu yang dibawa oleh setiap aktor. Kedua, kerja sama dalam hal ini menunjukkan bahwa dapat memberikan keuntungan atau imbalan kepada para aktor yang saling terlibat (Milner, 1992). Berdasarkan penjelasan dari Milner tersebut dapat dilihat bahwa kerja sama yang dilakukan oleh aktor atau negara itu berkaitan pada unsur penting berupa arah dan tujuan dari kerja sama serta keuntungan apa yang akan didapatkan dari kerja sama terhadap aktor tersebut.

Kerja sama internasional terus mengalami perkembangan dan mulai berfokus pada organisasi internasional dan perjanjiannya. Meskipun dalam implementasinya mungkin sulit untuk dijalankan, hal ini dikarenakan perubahan sistem kerja sama internasional yang sebelumnya mengikat menjadi tidak mengikat. Seperti yang disampaikan oleh Xinyuan Dai, Duncan Snidal, dan Michael Sampson (2010), kesepakatan dalam perjanjian kerja sama internasional mengalami konstruksi terkait aturan dan norma baru. Kerja sama internasional dalam hal ini tidak hanya terjadi antar individu saja, namun juga antar entitas kolektif yakni seperti negara, perusahaan, partai politik, organisasi etnis, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam kerja sama internasional juga dapat menyertakan aktor-aktor lainnya seperti organisasi antar pemerintah (IGO) dan juga organisasi non-pemerintah (LSM) (Dai et al., 2010). Lingkup kerja sama internasional yang lebih luas ini tentu memiliki tujuan kerja sama yang berbeda sesuai dengan bidang atau isu yang diangkat dalam kerja sama tersebut. Kerja sama internasional saat ini juga bersifat tidak terikat atau *non-binding* yang menjadikan kesepakatan dalam perjanjian kerja sama internasional lebih ke arah kesepakatan bersama dan tidak

memiliki keharusan ataupun kewajiban dalam rangka untuk mengimplementasikan hasil kesepakatan yang telah dibuat dalam kerja sama tersebut.

Menurut Xinyuan Dai, Duncan Snidal, dan Michael Sampson (2010) terdapat beberapa tren, kebutuhan, dan kemungkinan yang akan terjadi dalam kerja sama internasional yaitu antara lain terdapat manfaat dan keuntungan yang mudah didapatkan dari kemajuan teoretis dalam kerja sama internasional yakni dengan adanya adaptasi dari hasil teori yang akan menjadi dorongan dalam penelitian dan analisis yang lebih rinci mengenai masalah dalam kerja sama tertentu. Penggunaan rasionalitas juga menjadi hal penting dalam kerja sama internasional yakni dengan melalui pertimbangan terhadap model efek emosi pada perilaku aktor internasional dalam praktik kerja sama internasional. selanjutnya, kerja sama terjadi karena didukung oleh pengaturan berulang yaitu adanya timbal balik dan juga dipengaruhi oleh adanya reputasi. Reputasi dianggap menjadi mekanisme penting yang dapat memengaruhi hasil dari kerja sama yaitu melalui faktor kepercayaan. Hal ini bermaksud bahwa aktor yang bekerja sama dapat dipercayakan dan dapat memberikan timbal balik dalam kerja sama yang telah disepakati. Maka dari itu, reputasi dan kepercayaan cukup penting bagi suatu negara karena hal ini menyangkut pada pentingnya perilaku internasional kepada negara tersebut dan sekaligus menunjukkan kredibilitas dari negara tersebut (Dai et al., 2010).

Dengan kata lain, kerja sama internasional menjadi sebuah wadah integrasi dalam kerja sama yang saling memiliki tujuan bersama antar negara namun memiliki sifat yang lebih longgar dan tidak mengikat. Untuk mencapai kerja sama internasional yang berhasil dan terealisasikannya kepentingan bersama, maka negara-negara yang bersangkutan dalam kerja sama internasional ini harus melakukan penyesuaian terhadap berbagai fenomena yang terjadi di dunia dan juga terkait kebijakan masing-masing negara sehingga dapat memenuhi kepentingan negara tersebut dalam kerja sama internasional. Kerja sama internasional saat ini lebih berfokus pada pencapaian target dan mengupayakan pemanfaatan dari kerja sama ini untuk mencapai kesepakatan bersama. Seperti tujuan awal, kerjasama internasional memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerja sama internasional dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah antara dua negara atau lebih (Oktora et al., 2019).

Kerja sama antar negara atau kerja sama multilateral telah berkembang ke dalam berbagai bidang seperti perekonomian, perdagangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga teknologi. Kerja sama multilateral berarti bekerja sama antara baik dari pihak pemerintah dengan pemerintah maupun antar pemerintah dengan lembaga-lembaga non-pemerintah yang dilakukan dengan cara pengambilan suatu tindakan dan keputusan secara bersama-sama demi mencapai hasil atau tujuan bersama. Pemerintah dan lembaga non-pemerintah menjadi fasilitator yang dapat melakukan elaborasi dengan berbagai ketentuan serta dapat membuat program-program yang memiliki manfaat dalam suatu kerja sama. Kerja sama multilateral juga menjadi penting dalam meningkatkan kemajuan dalam berbagai bidang serta sebagai usaha antar negara-negara dalam menangani isu-isu global yang menjadi permasalahan bersama. Bagi Indonesia, kerja sama multilateral menjadi sangat penting dalam rangka percepatan pertumbuhan, khususnya terkait perekonomian negara. Kerja sama multilateral juga dianggap dapat membantu memenuhi dan mendorong peningkatan serta penguatan berbagai kepentingan nasional negara. Kepentingan nasional tentu menjadi hal yang paling penting dan esensial bagi setiap negara yang berdaulat. Seperti yang didefinisikan oleh Nuechterlein terkait kepentingan nasional yaitu sebagai “kebutuhan dan keinginan yang dirasakan dari satu negara berdaulat dalam kaitannya dengan negara berdaulat lainnya yang terdiri dari lingkungan eksternal”.

Kekuatan menengah sering diidentifikasi berdasarkan posisi mereka dalam hierarki internasional, geografi mereka, dan keterlibatan mereka dalam kegiatan-kegiatan yang patut diteladani (pendekatan normatif). Kemampuan *middle power countries* untuk mengambil inisiatif semacam itu tentu sebagian didasarkan pada posisi mereka dalam hierarki internasional (Cooper et al., 1993). Sampai batas tertentu, perubahan dalam sistem internasional melalui pembentukan G20 dapat dilihat sebagai tujuan yang konsisten, dengan tanggung jawab untuk memperkuat perilaku kolektif dalam mendukung sistem internasional. Sesuai dalam buku Robert Keohane (1969) *Lilliputian's Dilemmas: Small States in International Politics*, kekuatan menengah adalah negara yang para pemimpinnya menganggap bahwa ia tidak dapat bertindak sendiri secara efektif, tetapi mungkin dapat memiliki dampak sistemik dalam kelompok kecil atau melalui lembaga internasional. Dimana poin ini masih relevan untuk konteks forum multilateral G20 (Keohane, 1969).

Pergeseran kekuasaan dari negara maju ke negara berkembang menempatkan kekuatan menengah pada posisi strategis dan penting. G20 sendiri diciptakan untuk mengakomodasi bangkitnya pasar negara berkembang dalam ekonomi dunia. Dengan hal ini tentunya dapat memberikan panggung terbuka di mana negara-negara pasar berkembang yang besar dan negara-negara maju membahas masalah-masalah global yang mendesak dengan wadah yang sama. Dalam sistem internasional yang semakin terbagi antara negara maju besar dan negara berkembang besar, kekuatan menengah cenderung mengadakan pemungutan suara untuk memecahkan kebuntuan yang sering terjadi dalam negosiasi multilateral.

Keberhasilan forum G20 sangat bergantung pada pandangan ke depan dan bimbingan negara-negara terkemuka baik di blok negara maju maupun negara berkembang, hal yang dapat membantu lainnya adalah jika ada perantara atau penengah di antara kedua kelompok agar dapat meredam konflik yang kemungkinan terjadi akibat perbedaan pendapat. Dalam lingkungan globalisasi kontemporer, kepentingan negara menjadi lebih beragam, kerjasama antar negara menjadi lebih luas dan lintas isu. G20 menunjukkan bahwa kekuatan menengah dapat membuat perbedaan dan berbagi beban kepemimpinan dengan kekuatan besar. Namun tetap dengan catatan bahwa kekuatan menengah harus tetap waspada, jika ingin mempertahankan pengaruhnya di forum G20 (Gunawan & Somantri, 2023).

Pandemi COVID-19 telah menjadi tantangan yang cukup berpengaruh bagi negara-negara di dunia. Setiap negara memberlakukan pengendalian, penguncian, memperkecil mobilitas banyak orang dengan caranya masing-masing. Situasi dan kondisi tak terduga ini tentu mendorong para pemimpin negara untuk bergerak cepat dalam menangani hal-hal yang berimbas pada roda kehidupan. Banyak kerja sama dilakukan oleh pemerintah dunia untuk saling bahu-membahu dalam menangani pandemi COVID-19 beserta pemulihan bagi setiap negara. Kerja sama yang sering terjadi selama beberapa dekade terakhir yaitu dengan melakukan kerja sama multilateral. *Intergovernmental Organization* (IGO) ataupun forum-forum multilateral dibentuk untuk menjadi wadah atau forum diskusi sekaligus yang dapat memberikan beragam solusi terhadap isu-isu global bagi negara anggotanya. Salah satu forum multilateral yang membahas isu-isu terkait upaya pengurangan resiko dan pemulihan akibat dari pandemi COVID-19 yaitu *Group of Twenty* (G20). Forum kerja sama multilateral ini merupakan forum kerja sama

antara 19 negara dan 1 kawasan ekonomi utama dunia, yakni Uni Eropa. Forum ini

Amelia Fitria Halli, 2023

PERAN INDONESIA DALAM MENGEMBANGKAN AGENDA EKONOMI DIGITAL PADA ISU KONEKTIVITAS DIGITAL SELAMA MASA PRESIDENSI G20 PERIODE 2021-2022

4

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dibentuk untuk menjadi forum diskusi yang membahas berbagai macam isu-isu, kebijakan ekonomi dan juga keuangan global.

Dengan rekam jejak yang ada, G20 telah menjadi forum kerja sama multilateral yang berhasil menangani krisis-krisis dunia seperti pada saat krisis keuangan Asia dan global yang terjadi pada tahun 1998 dan 2008. Maka dari itu, G20 diharapkan menjadi forum yang mampu menghasilkan solusi dan program-program yang dapat menjadi alat untuk pemulihan secara global pasca adanya krisis yang terjadi akibat pandemi COVID-19. G20 memiliki komitmen dalam melakukan berbagai upaya untuk memulihkan keadaan dunia beserta menjalankan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang berkelanjutan, inklusif, dan tidak meninggalkan siapa pun di belakang. Keikutsertaan dan usaha bersama dari semua negara yang berkolaborasi dalam forum ini menjadi sangat penting yang dalam pencapaiannya dibagi ke dalam dua jalur yaitu jalur Sherpa dan jalur Keuangan.

Selama masa pandemi, Indonesia tetap secara aktif melakukan beragam kerja sama internasional baik secara bilateral maupun multilateral, khususnya terkait kerja sama dalam bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi. Indonesia telah secara aktif mengambil peran yang cukup berpengaruh di kancah internasional. Beberapa bentuk peran aktif dan keberhasilan Indonesia dalam kerja sama baik dalam lingkup internasional maupun multilateral yaitu dapat dilihat dalam kerja sama ASEAN, GNB, KAA dan G20. Dalam level bilateral, peran aktif terbaru yang dilakukan oleh Indonesia dapat dilihat dari kunjungan Indonesia ke Rusia dan Ukraina yang bertujuan untuk menjadi penghubung serta mendorong perdamaian atas kedua negara yang sedang berkonflik tersebut.

Indonesia juga telah berhasil melakukan negosiasi terkait perdamaian dan terkait ketersediaan dan keamanan pangan. Hal ini dikarenakan Rusia dan Ukraina merupakan pemasok utama pupuk dan pangan dunia. Selain itu, Indonesia juga ikut membahas isu-isu kemanusiaan dan ikut aktif dalam penyelesaian berbagai krisis global seperti yang baru saja terjadi yaitu adanya pandemi COVID-19. Salah satu kerja sama multilateral yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka pemulihan pasca pandemi COVID-19 yaitu melalui forum kerja sama multilateral *Group of Twenty* (G20).

Secara signifikan, Indonesia telah memberikan andil-nya selama keikutsertaan Indonesia dalam forum serta program yang dihasilkan oleh G20. Indonesia juga

akhirnya mendapatkan sebuah kesempatan yang baik dengan diberikan mandat pertama kalinya untuk memegang tongkat estafet Presidensi G20 setelah ditetapkan dalam Riyadh Summit 2020 dan penyerahan kepemimpinan G20 ini dilaksanakan pada akhir dari KTT G20 pada tahun 2021 yang diselenggarakan di Roma, Italia (BI, 2022).

Kepemimpinan Presidensi G20 Indonesia dimulai sejak Desember 2021 hingga November 2022 dan Indonesia dipercaya untuk memimpin forum kerja sama ini dalam rangka pemulihan berbagai macam sektor pasca COVID-19. Indonesia mengambil tema utama yakni “*Recover Together, Recover Stronger*” yang berarti pulih bersama, pulih lebih kuat. Dengan tema ini, Indonesia berusaha untuk mengajak seluruh dunia dalam rangka untuk saling bekerja sama, saling mendukung untuk pemulihan bersama serta bangkit lebih kuat dan secara berkelanjutan (BI, 2022). Dalam Presidensi ini, Indonesia bersama-sama dengan negara anggota G20 memiliki fokus untuk melakukan pemulihan bersama pasca pandemi COVID-19 dan Indonesia juga mengangkat tiga isu yang menjadi prioritas utama yaitu terkait arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital. Kementerian Kesehatan akan mengoordinasi terkait isu arsitektur kesehatan global, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mengoordinasikan terkait isu transformasi digital dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan mengoordinasikan terkait isu terakhir yaitu mengenai isu transisi energi berkelanjutan.

Perkembangan sektor digitalisasi yang cepat menjadi pertimbangan krusial bagi Indonesia untuk memilih isu transformasi digital sebagai salah satu isu utama yang penting untuk dibahas dalam perhelatan G20 di Indonesia. Dengan adanya digitalisasi, memungkinkan adanya percepatan dalam pemulihan pasca krisis dengan konektivitas yang lebih luas dan cepat. Tidak hanya terkait teknologi, dengan adanya transformasi digital, banyak hal-hal yang akan berubah menjadi lebih baik seperti memperkecil celah informasi-informasi yang tidak dapat dijangkau oleh orang banyak, mempercepat keselarasan secara global dan juga dapat mendukung berbagai pemulihan pasca krisis secara merata. Pembahasan terkait digitalisasi sudah beberapa kali diangkat dalam isu-isu G20.

Dewasa ini, digitalisasi dianggap menjadi salah satu indikator utama dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, khususnya ekonomi digital. Dalam Presidensi G20 di Indonesia, isu mengenai ekonomi digital diangkat pemerintah dengan membuat

memiliki tema utama yaitu “*Achieving a Resilient Recover: Working Together for More Inclusive, Empowering, and Digital Sustainable Transformation*”. DEWG ini bertujuan untuk membahas ekonomi digital dalam rangka membentuk ekosistem digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Menurut laporan Bank Dunia pada tahun 2021, Indonesia menjadi salah satu dari lima negara dengan penggunaan internet yang tinggi (Kominfo, 2022). Maka dari itu, terdapat banyak peluang yang perlu dimaksimalkan dalam penggunaan internet yang lebih produktif. Pemerintah harus mendukung infrastruktur, pemerataan akses digital, pembuatan kebijakan tata kelola sistem digital, serta beragam pengembangan kapabilitas dan juga literasi digital dari berbagai kalangan.

Dalam isu transformasi digital ini terdapat tiga fokus pembahasan di dalamnya yaitu terkait ekonomi digital dengan isu-isu seperti *Digital Connectivity and Post COVID-19 Recovery, Digital Skills, and Digital Literacy, dan Cross-border Data Flow and Data Free Flow with Trust*. Pada isu pertama mengenai *Connectivity and Post COVID-19 Recovery*, membicarakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan isu ekonomi digital dalam rangka untuk melakukan pemulihan pasca pandemi COVID-19 dalam skala global. Pada isu kedua mengenai *Digital Skills and Digital Literacy*, Indonesia berusaha untuk mengajak dan mengundang negara anggota G20 dalam melakukan peningkatan terhadap nilai-nilai pemanfaatan teknologi digital terhadap masyarakat. Hal ini akan disertai dengan memberikan fasilitas yang memadai dalam menciptakan ekosistem digital yang inklusif di dalam skala tatanan kerja sama multilateral. Pada isu ketiga mengenai *Cross-border Data Flow and Data Free Flow with Trust*, Indonesia berupaya untuk memberikan fasilitas berupa ruang untuk melakukan diskusi terkait arus data lintas batas negara. Lebih lanjut, Indonesia akan mengupayakan penerimaan terhadap implementasi dari prinsip *lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity*.

Pada isu pertama terkait ekonomi digital yaitu *Digital Connectivity and Post COVID-19 Recovery*, Indonesia berupaya untuk memajukan pemerataan terkait konektivitas digital baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang. Ditambah sejak adanya pandemi COVID-19, seluruh masyarakat dunia sangat bersahabat dengan dunia digital. Namun, adanya kesenjangan terhadap masyarakat yang masih belum mampu untuk mengakses internet atau teknologi digital, sehingga dengan bukti tersebut, Indonesia mengangkat isu terkait konektivitas digital ke dalam isu prioritas

Amelia Fitria Halli, 2023

PERAN INDONESIA DALAM MENGEMBANGKAN AGENDA EKONOMI DIGITAL PADA ISU KONEKTIVITAS DIGITAL SELAMA MASA PRESIDENSI G20 PERIODE 2021-2022

7

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

forum G20 sekaligus sebagai langkah nyata dalam rangka untuk pemulihan pasca pandemi COVID-19. Indonesia berkeinginan untuk dibentuknya kerja sama yang kolaboratif antar negara anggota G20 yang didalamnya berkumpul negara maju dan juga negara berkembang untuk pemerataan akses internet dan digitalisasi terhadap setiap negara.

Lebih lanjut, konektivitas digital ini dinilai sangat berpengaruh terhadap ekonomi digital. Menurut data dari Kementerian Kominfo, terdapat sekitar 2.229 startup di Indonesia yang tentunya membutuhkan adanya digitalisasi yang merata. Hal ini dikarenakan akan berdampak pada perkembangan ekonomi digital di Indonesia (Andarningtyas, 2022). Indonesia juga mengusung konsep konektivitas digital yaitu “*People Center*”. Hal ini merupakan pengembangan dan transformasi dari konsep yang sudah ada pada pertemuan G20 sebelumnya yakni bertajuk “*Digital Human Center*” (Syahputra, 2022). Konsep “*People Centered*” berarti pembangunan berbagai aspek mulai dari infrastruktur, teknis, teknologi, dan kesiapan dari sumber daya manusia bekerja sama untuk membentuk kesatuan dalam digitalisasi.

Pemilihan topik peran Indonesia dalam mengembangkan agenda ekonomi digital pada isu konektivitas digital selama masa Presidensi G20 Indonesia ini berlandaskan oleh bagaimana peran aktif atau aksi nyata dari keikutsertaan Indonesia dalam forum G20 sejak bergabungnya Indonesia pada tahun 1999. Forum kerja sama multilateral ini dikenal sebagai forum untuk penyelesaian krisis yang sedang terjadi di dunia. Indonesia secara aktif terlibat dalam berbagai inisiatif dalam forum G20 seperti pada bidang ekonomi digital yaitu IDEA HUB (*Inclusive Digital Economy Accelerator*) yang dibentuk untuk menjadi wadah pertukaran ide-ide terkait ekonomi digital dari himpunan perusahaan start-up unicorn dari negara anggota G20.

Dalam bidang infrastruktur, Indonesia berinisiatif membuat GICA (*Global Infrastructure Connectivity Alliance*) yang menjadi wadah untuk mendukung konektivitas melalui kooperasi dan pertukaran pengetahuan terkait infrastruktur. Dalam bidang keuangan, Indonesia juga memberikan inisiatif yaitu dalam GESF (*Global Expenditure Support Fund*) yang bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap negara-negara berkembang perihal pengamanan anggaran nasional dalam krisis likuiditas (Kemenkeu, 2022). Pada G20 tahun 2021-2022, Indonesia ditunjuk sebagai pemegang keketuaan akan memiliki peranan yang cukup penting, terutama dalam rangka untuk pemulihan pasca pandemi COVID-19.

Maka dari itu, penelitian ini akan berfokus untuk membahas mengenai bagaimana peran Indonesia dalam forum G20 terkait isu ekonomi digital khususnya berkaitan dengan isu konektivitas digital. Pembahasan mengenai konektivitas digital menjadi sangat penting dan relevan dalam ekonomi global karena memiliki dampak yang cukup besar pada pergerakan dan perkembangan perekonomian. Hal ini dikarenakan setelah terjadinya pandemi COVID-19, masyarakat mulai ketergantungan dengan ekosistem digital di berbagai sektor, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Penelitian ini cukup relevan untuk melihat apakah posisi Indonesia dalam forum G20 memiliki manfaat nyata terhadap pembangunan dan pemulihan perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19. Sekaligus untuk melihat bagaimana dan apa saja peran Indonesia dalam forum multilateral ini secara khusus dalam bidang transformasi digital. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan limitasi periode Presidensi G20 2021-2022 di Indonesia. Hal ini dikarenakan terdapat dua faktor antara lain; yaitu Indonesia pertama kalinya dipercaya untuk memegang kepemimpinan atau keketuaan dalam forum multilateral ini yakni G20 dan transformasi digital yang menjadi isu utama dalam Presidensi G20 Indonesia.

Sehubungan dengan pembahasan mengenai peran Indonesia dalam forum *Group of Twenty* (G20) dan isu transformasi digital khususnya terkait agenda ekonomi digital serta konektivitas digital yang diusung dalam Presidensi G20 2021-2022, sejumlah literatur telah membahas pengetahuan atau pemikiran dengan menggunakan berbagai sudut pandang, objek dan ruang lingkup dari penelitian terkait. Peneliti menggunakan beberapa rujukan artikel dalam jurnal internasional dan jurnal nasional yang relevan dalam rangka untuk memberikan gambaran terhadap topik penelitian yang diangkat oleh peneliti. Salah satu penelitian terkait G20 dan ekonomi digital yang peneliti gunakan untuk menjadi acuan utama di bidang ini adalah penelitian yang dilakukan oleh J.J. Kirton, B. Warren (2018) berjudul “*G20 Governance of Digitalization*” yang membuat artikel terkait bagaimana sistematika penilaian kinerja dari KTT G20 dalam digitalisasi yang terus berkembang. KTT G20 pertama kali yang membahas digitalisasi yakni pada tahun 2008 sebagai tanggapan atas krisis keuangan Amerika yang ternyata berdampak secara global. Selanjutnya, para pemimpin dari G20 mengakui *e-commerce* sebagai alat penting untuk mengelola krisis yang terjadi di dunia.

Lebih lanjut, Kirton dan Warren menyampaikan bahwa digitalisasi di dunia yang mengglobal juga membawa banyak manfaat. Hal ini berpotensi untuk

menyelamatkan nyawa, untuk membantu memenuhi tantangan perubahan iklim dan menciptakan lapangan kerja. Dalam laporan OECD juga menjelaskan bahwa “teknologi, aplikasi cerdas, dan inovasi lain dalam ekonomi digital dapat meningkatkan layanan dan membantu mengatasi tantangan kebijakan di berbagai bidang, termasuk kesehatan, pertanian, tata kelola publik, pajak, transportasi, pendidikan, dan lingkungan, antara lain” (OECD, 2017). Hasil temuan dari artikel jurnal ini adalah terdapat beberapa faktor penilaian yang dapat menjadi tolak ukur untuk menilai bagaimana tata kelola digitalisasi G20 yang berawal pada pertemuan KTT di Washington DC pada tahun 2008.

Dengan mengangkat isu ekonomi digital, perdagangan elektronik, atau *e-commerce*, yang diidentifikasi sebagai alat manajemen krisis keuangan. Sejak saat itu, perhatian G20 terhadap ekonomi digital perlahan semakin meluas hingga ke tahun-tahun berikutnya. Pada KTT Hamburg 2017, G20 dibangun di atas agenda Hangzhou yang membawa isu dan perhatian khusus dalam rangka pengembangan keterampilan digital guna menghasilkan lapangan kerja, dengan penekanan baru dan kuat yakni pada kesenjangan *digital-gender*. Maka dari itu, G20 telah memilih untuk menjadikan digitalisasi sebagai agenda pembahasan dalam KTT dan berfokus tidak hanya untuk kepada ekonomi dan stabilitas keuangan, namun juga kepada digitalisasi agar semua orang di dunia saling terhubung dan terglobalisasi. Penelitian Kirton dan Warren ini telah membuka pandangan bagi peneliti terkait bagaimana digitalisasi sangat penting untuk dibahas dan menjadi urgensi di dalam dunia internasional, terutama dalam bidang ekonomi.

Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Afriyadi Cahyadi dan Róbert Magda (2021) dengan judul “*Digital leadership in the Economies of the G20 Countries: A Secondary Research*” yang berfokus dalam perkembangan transformasi digital bagi negara anggota G20. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penyelidikan terhadap kemampuan kepemimpinan digital dari negara-negara G20 terkait ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai faktor, mulai dari kesiapan digital, inovasi, daya saing 4.0, dan juga untuk mengetahui keterkaitan antar variabel. Penelitian ini menggabungkan kesiapan digital global yang diteliti oleh Cisco pada tahun 2019, inovasi yang diteliti oleh Cornell University (2019), dan daya saing 4.0 yang diteliti oleh (WEF 2019) sebagai faktor utama yang berkaitan dengan kemampuan kepemimpinan digital dalam perekonomian. Dalam penelitian ini, negara-negara G20 dijadikan sebagai objeknya. Negara-negara G20

selalu mendorong pertumbuhan ekonomi secara global dan lebih modern dengan mengembangkan berbagai teknologi digital dalam rangka untuk membuat peluang baru. Secara global, transformasi digital telah menjadi prioritas utama dalam berbagai agenda nasional masing-masing negara. Hal ini bertujuan untuk membangun perekonomian digital. Dalam menciptakan dan mengoptimalkan ekonomi digital, dibutuhkan pembangunan dan pengembangan secara menyeluruh (Cahyadi & Magda, 2021).

Terkait kelembagaan dari G20, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Axel Berger, Andrew F Cooper & Sven Grimm (2020) dengan judul “*A Decade of G20 Summity: Assessing the Benefits, Limitations and Future of Global Club Governance in Turbulent Times*” mengenai bagaimana perubahan dan perkembangan dari G20 serta bagaimana efektivitas G20 dalam menangani berbagai krisis global. Penelitian ini secara khusus membahas terkait bagaimana sifat dari G20 sebagai sebuah forum multilateral dalam tata kelola global. G20 yang berawal dari usaha untuk menyelesaikan suatu krisis ekonomi global, menjadikan G20 dipandang sebagai sebuah wadah internasional yang dapat memiliki kesempatan bagi negara-negara yang tergabung didalamnya untuk melakukan sebuah pertemuan yang rutin dan berkelanjutan. G20 telah menjadi wadah tata kelola global yang ter periodisasi dan terdesentralisasi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai interaksi yang dilakukan oleh berbagai organisasi internasional, negara non-G20 dan organisasi regional serta pemangku kepentingan masyarakat termasuk bisnis, organisasi buruh, organisasi non-G20 (Berger et al., 2019).

Sementara dalam penelitian Andrew F Cooper (2019) berjudul “*The G20 is Dead as A Crisis or Steering Committee: Long Live the G20 as Hybrid Focal Point*”, menekankan pada relevansi dari G20 yang dinilai masih ada hingga saat ini. Hal ini dikarenakan G20 merupakan forum yang memiliki peraturan terkait tata kelola jenis baru. Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai tata kelola G20 dilihat dari pandangan holistik. Disertai dengan fokus dari pengembangan kelembagaan yang berhubungan dengan G20. Maka dari itu, G20 dianggap tidak seharusnya terlalu memiliki fokus pada upayanya terhadap pencapaian keselarasan secara menyeluruh. Akan tetapi, G20 dapat menyediakan wadah yang lebih diperuntukkan untuk melakukan musyawarah yang sekaligus menjaga aksi negara dalam ukuran atau ketentuan yang dapat diterima (Cooper, 2019).

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai keberhasilan dan pengaruh G20 terhadap kebijakan serta penanganannya terhadap krisis dapat dilihat dalam penelitian Suman Bery, Filippo Biondi, Sybrand Brekelmans (2019) dengan judul “*Twenty Years of the G20: Has It Changed Global Economic Governance?*”. Penelitian ini menggunakan penilaian retrospektif yang memiliki fokus pada dua pertanyaan utama yakni (1) Apakah KTT G20 berhasil dalam melakukan promosi terkait kebijakan ekonomi makro dengan konsekuensi lintas batas yang positif, sekaligus mencegah hal sebaliknya? (2) Sejauh mana perluasan G7 ke berbagai kelompok ekonomi berkembang dan secara signifikan mengubah wacana dan memengaruhi hasil substantif. Hasil temuan penelitian ini adalah bahwa G20 memainkan peran kunci selama krisis pada tahun 2008. Namun sejak saat itu koordinasi dari kebijakan-kebijakan menjadi bermasalah. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa Presidensi G20 dari negara-negara berkembang telah melakukan berbagai upaya dalam rangka untuk membentuk agenda yang mengarah pada isu-isu yang menjadi kepentingan setiap anggota dari G20 (Bery et al., 2019).

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Alvela Salsabilah Putri (2020) yang berjudul “G20: Mediator untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia” membahas mengenai bentuk kerja sama dari G20 khususnya dalam bidang ekonomi dan moneter. Penelitian ini menggunakan metode konseptual yang menjelaskan terkait penataan dan fungsi dari forum G20 terhadap perekonomian dunia serta bagaimana G20 dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Dalam penelitian ini, G20 dianggap membantu perkembangan dari pertumbuhan perekonomian nasional Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kesempatan kerja sama dan investasi yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara anggota G20 lainnya. Kerja sama dan investasi ini tentu dapat memberikan pengaruh dan keuntungan yang besar bagi perekonomian Indonesia. Penelitian ini juga memberikan contoh keaktifan Indonesia dalam forum G20 yakni pada KTT G20 di Osaka. Indonesia secara aktif memberikan ide yang berkaitan dengan ekonomi digital yang diberi nama IDEA Hub (Putri, 2020).

Pada artikel Michael A. Peters (2022) berjudul “*Digital Trade, Digital Economy and the Digital Economy Partnership Agreement (DEPA)*” berfokus pada perkembangan ekonomi digital dalam perekonomian secara global. Ekonomi digital dalam penelitian ini dilihat sebagai kegiatan ekonomi yang menerapkan pengetahuan berbasis informasi dan digital dimana terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya ekonomi digital.

Faktor-faktor tersebut antara lain seperti adanya internet, komputasi awan, data besar, *Internet of Things* (IoT), *fintech*, dan teknologi digital lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi berbasis digital dan juga berpengaruh terhadap interaksi sosial. Penelitian ini juga membahas bagaimana konferensi G20 telah berusaha untuk melakukan pemanfaatan terhadap peluang digital dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan dalam sektor ekonomi yang menyeluruh (Peters, 2022).

Lebih lanjut, perkembangan dan urgensi dari transformasi digital juga paling menonjol beberapa tahun terakhir serta menjadi hal yang sangat dibutuhkan secara global. Penelitian mengenai perkembangan dan urgensi terkait transformasi digital telah dilakukan oleh Thanh Nguyen Hai, Quang Nguyen Van, dan Mai Nguyen Thi Tuyet (2021) yang berjudul “*Digital Transformation: Opportunities and Challenges for Leaders in the Emerging Countries in Response to Covid-19 Pandemic*” dengan berfokus pada perkembangan transformasi digital secara kognitif, aspek-aspek positifnya, urgensi dari sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 serta tantangan dan peluangnya hingga pada rekomendasi yang dapat digunakan. Dalam penelitian ini, untuk mengembangkan ekonomi digital dibutuhkan infrastruktur jaringan digital yang kuat, aman dan adaptif. Terkhusus untuk negara-negara berkembang yang sebagian besar masih belum siap dalam memaksimalkan konsep ekonomi digital. Keterbatasan infrastruktur, kurangnya keahlian dalam bidang digital dan proses adaptasi yang lambat kerap dialami oleh negara-negara berkembang. Maka dari itu, dalam artikel ini dijelaskan mengenai keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk membantu meningkatkan keefektifan sebuah kepemimpinan dalam transformasi digital (Hai et al., 2021).

Sehubungan dengan pembahasan terkait ekonomi digital khususnya di negara berkembang, salah satu penelitian yang menjadi acuan utama dalam penelitian ini yaitu pada kajian yang dilakukan oleh Semyachkov K.A. (2019) berjudul “*Digital Economy in Developing Countries: Problems and Prospects*”. Penelitian ini melakukan pengembangan terhadap prinsip-prinsip yang dapat membangun ekonomi digital di negara berkembang. Hasil temuan Semyachkov adalah ekonomi digital merupakan prioritas utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi negara berkembang. Perkembangan dalam ekonomi digital dapat dilihat dari adanya aset intelektual, peningkatan *awareness* terhadap data, pengenalan sistem internet secara luas, organisasi

manajemen jaringan, dan juga pertukaran data secara global. Platform digital menjadi sebuah alat yang harus dikembangkan dalam ekonomi digital di negara-negara berkembang yang mencakup perkembangan teknologi untuk proses data yang lebih besar. Selain itu, prinsip dalam membangun sistem ekonomi digital yaitu dengan melakukan pengembangan terhadap keterampilan digitalisasi yang dapat meningkatkan nilai praktis di negara berkembang. Penelitian ini tentunya dapat menjadi acuan bagi para peneliti perkembangan ekonomi digital di negara berkembang dengan lebih aktual dalam melihat prinsip yang harus dipegang oleh negara berkembang dalam perkembangan ekonomi digital. Dengan adanya perkembangan dalam ekonomi digital khususnya di negara berkembang, maka dapat meningkatkan kualitas hidup bagi masing-masing warga negara serta dapat meningkatkan kelestarian sosial ekonomi dan lingkungan negara (Semyachkov, 2019).

Dalam perkembangan ekonomi digital, diperlukan adanya konektivitas digital sebagai penghubung yang dapat menjangkau berbagai hal dengan penggunaan teknologi yang lebih cepat dan efisien. Seperti yang telah dibahas dalam penelitian yang dilakukan oleh Rendro Prasetyo (2020) yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Akselerasi Transformasi Digital Industri Kecil dan Menengah”. Penelitian ini membahas terkait perkembangan konektivitas digital yang ditandai dengan teknologi digital yang berkembang secara pesat dan berpengaruh pada berbagai bidang, khususnya terhadap aspek sosial dan ekonomi. Konektivitas digital ini dapat menghubungkan antar aktor kegiatan ekonomi secara luas dan dapat menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintah dengan teknologi yang lebih efisien (Prasetyo, 2020).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lurong Chen dengan judul “*Improving Digital Connectivity for E-commerce: A Policy Framework and Empirical Note for ASEAN*” membahas terkait bagaimana konektivitas yang tidak hanya berdasarkan pada keterhubungan secara fisik, namun juga termasuk dengan adanya keterhubungan secara siber yang memungkinkan adanya arus bebas data, informasi, dan berbagai layanan secara digital. Dengan adanya konektivitas digital ini akan berdampak pada ekosistem yang ramah digital dan juga dapat memengaruhi kemampuan ekonomi secara keseluruhan dalam sebuah negara (Chen, 2020).

Penelitian mengenai ekonomi digital di negara berkembang yang dilakukan oleh Hai et al. (2021) dan Semyachkov (2019) berfokus pada perkembangan dan prinsip dalam

ekonomi digital di negara berkembang. Kedua penelitian tersebut mengemukakan bahwa perkembangan ekonomi digital di negara-negara berkembang membutuhkan kesiapan mulai dari prinsip dan infrastruktur. Penelitian ini menjelaskan mengenai pengembangan ekonomi digital yang dilakukan secara maksimal dapat memberikan dampak yang baik untuk sebuah negara khususnya negara berkembang (Hai et al., 2021; Semyachkov, 2019). Hai et al. menjelaskan secara praktis bahwa transformasi digital dapat menjadi sebuah inovasi yang memungkinkan untuk mendorong kesuksesan khususnya dalam bidang ekonomi digital di seluruh negara, terutama negara-negara berkembang (Hai et al., 2021). Sama seperti Hai et al., Semyachkov memiliki argumen bahwa perkembangan ekonomi digital harus memiliki prinsip-prinsip yang dapat membangun, sehingga perekonomian dan kualitas hidup warga negara khususnya negara berkembang akan menjadi lebih baik.

Berbeda dengan Hai et al. (2021) dan Semyachkov (2019) yang menjelaskan terkait perkembangan ekonomi digital di negara berkembang. Zhang et al. (2022) berfokus pada perihal ekonomi digital selama masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menganalisis mengenai peran ekonomi digital sebagai salah satu langkah yang cukup efektif dalam upaya untuk mengurangi dampak buruk perekonomian akibat pandemi COVID-19 dengan mengangkat bukti dari negara-negara sepanjang *Belt and Road*. Hasil temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa ekonomi digital dianggap berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut. Selama masa pandemi COVID-19 juga terdapat peningkatan dalam industri digital di negara-negara sepanjang "*Belt and Road*". Sehingga hal ini memengaruhi sisi permintaan yang lebih besar daripada sisi penawaran dalam industri digital (Zhang et al., 2022).

Selain penelitian terdahulu yang membahas terkait ekonomi digital dalam G20, terdapat penelitian terdahulu yang membahas bagaimana pertumbuhan ekonomi digital dan kemungkinan prospeknya khususnya di Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Yuliana (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "*The Digital Economy Growth and Prospect in Indonesia During the Covid-19 Pandemic*" menjelaskan bahwa terdapat langkah-langkah yang dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Langkah-langkah tersebut antara lain seperti dengan mengembangkan kewirausahaan, melakukan kerja sama internasional khususnya dalam bidang ekonomi digital, serta melakukan

peningkatan perihal konektivitas internet yang baik dan memadai. Selain itu, faktor penting lainnya yang dapat dilihat sebagai pengembangan ekonomi digital yaitu adanya keterampilan dalam bidang digital, peningkatan dalam literasi digital, privasi, dan juga terkait pengaturan keamanan siber. Jadi, hasil temuan dari penelitian ini adalah perkembangan ekonomi digital di Indonesia secara signifikan menghasilkan kinerja yang baik, meskipun dalam masa pandemi COVID-19 (Yuliana, 2021).

Berdasarkan sejumlah penelitian terdahulu mengenai ekonomi digital dan G20, faktanya bidang transformasi digital terkhusus ekonomi digital telah menjadi hal penting yang harus dibahas dalam forum-forum multilateral. Hal ini dikarenakan mengacu pada perubahan tatanan global yang lebih mengarah kepada digitalisasi, sehingga perkembangannya dapat memberikan keterhubungan dan kebermanfaatannya bagi setiap negara di dunia (Kirton & Warren, 2018). Lebih lanjut, hasil dari temuan terkait ekonomi digital dapat diketahui bahwa beberapa penelitian membahas terkait perkembangan, pertumbuhan, prinsip, dan manfaat dari ekonomi digital khususnya di negara-negara berkembang serta bagaimana Indonesia sebagai negara yang termasuk ke dalam negara berkembang dalam menyikapi ekonomi digital terutama saat masa pandemi COVID-19 (Hai et al., 2021; Peters, 2022; Semyachkov, 2019; Yuliana, 2021; Zhang et al., 2022). Dalam perkembangan ekonomi digital dalam G20 dapat dilakukan peninjauan terkait awal mula digitalisasi menjadi isu yang penting dalam forum multilateral tersebut dan menjadi isu penting yang dapat memengaruhi kemampuan kepemimpinan digital dari suatu negara serta forum G20 yang berusaha untuk memanfaatkan peluang digital secara inklusif (Cahyadi & Magda, 2021; Kirton & Warren, 2018; Peters, 2022). Terkait perkembangan dan peran G20 sebagai forum multilateral yang menangani berbagai macam krisis global, relevansinya saat ini, serta bentuk kerja sama antar negara G20 dalam bidang ekonomi (Berger et al., 2019; Bery et al., 2019; Cooper, 2019; Putri, 2020).

Dari sejumlah penelitian terdahulu mengenai ekonomi digital dan forum G20 dapat dilihat bahwa belum ada penelitian yang membahas terkait peran Indonesia dalam G20 dan dalam bidang ekonomi digital khususnya pada isu konektivitas digital. Penelitian ini akan berusaha menjelaskan dan menganalisis bagaimana peran Indonesia selaku pemegang tongkat estafet keketuaan G20 pada periode 2021-2022 yang mengangkat tiga isu utama, salah satunya adalah terkait transformasi digital. Oleh karena itu, penelitian ini

mengambil topik mengenai “Peran Indonesia dalam Mengembangkan Agenda Ekonomi Digital pada Isu Konektivitas Digital Selama Masa Presidensi G20 Periode 2021-2022”.

1.2 Rumusan Masalah

Keanggotaan sekaligus Presidensi yang telah Indonesia tempuh dalam forum *Group of Twenty* (G20) menjadi sebuah ajang untuk menunjukkan eksistensi serta pengakuan atas Indonesia di kancah internasional. Dengan adanya kesempatan kepemimpinan ini, Indonesia berusaha memaksimalkan perannya menjadi tuan rumah untuk mengoordinasikan serta menyampaikan berbagai aspirasi dengan cakupan yang lebih luas. Sejak Indonesia menjadi anggota dari G20 pada tahun 1999, Indonesia baru diberikan mandat untuk memegang tongkat Presidensi G20 kali ini dengan berfokus pada pemulihan bersama setelah adanya pandemi COVID-19. Terhitung telah lebih dari dua dekade keikutsertaan Indonesia di dalam G20. Dengan ini, membuktikan keaktifan Indonesia untuk selalu berkontribusi dalam berbagai isu internasional. Transformasi digital menjadi salah satu isu yang menjadi pembahasan dalam forum G20 beberapa tahun terakhir. Maka dari itu, peneliti berusaha untuk mencari jawaban atas pertanyaan **“Bagaimana peran Indonesia dalam mengembangkan agenda ekonomi digital pada isu konektivitas digital selama masa Presidensi G20 periode 2021-2022?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan keterlibatan aktif Indonesia dalam forum G20 dalam perkembangan agenda ekonomi digital pada isu konektivitas digital selama masa Presidensi G20 di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menambah literatur yang berkaitan dengan kerja sama G20 dan topik transformasi digital terutama terkait perkembangan ekonomi digital dan khususnya mengenai isu konektivitas digital di Indonesia yang kerap menjadi pembahasan dalam banyak forum multilateral, salah satunya yaitu pada forum G20.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- Manfaat Akademis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat secara relevan bagi perkembangan literatur terkait G20 dan ekonomi

digital. Peneliti juga berharap bahwa hasil penelitian ini akan menjadi sumber rujukan, bahan literatur, dan kontribusi yang substansial bagi ilmu Hubungan Internasional.

- **Manfaat Praktis:** Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam memberikan informasi dan manfaat baik secara langsung maupun secara tidak langsung serta memberikan informasi dan rekomendasi kebijakan perihal pengembangan kerja sama ekonomi digital.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam rangka untuk memberikan pemahaman terhadap alur pemikiran dari penelitian ini secara menyeluruh, maka penulisan dari penelitian ini akan dibagi ke dalam 6 (enam) bab beserta sejumlah sub-bab yang berkaitan. Isi bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I

Pendahuluan

Pada bab ini, Peneliti akan menjelaskan latar belakang dari topik penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II

Tinjauan Pustaka

Pada bab ini, Peneliti akan membahas dan menjabarkan terkait tinjauan pustaka terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik yang Peneliti jadikan acuan dalam penelitian ini. Bab ini juga menjelaskan terkait kerangka pemikiran, landasan teori dan konsep terkait penelitian.

BAB III

Metode Penelitian

Pada bab ini, Peneliti akan menjelaskan terkait metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari jenis penelitian dalam melakukan analisis permasalahan yang akan diteliti, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data untuk mengumpulkan

informasi terkait topik penelitian, serta terkait jadwal dan tempat dari penelitian.

BAB IV

Peran Indonesia dalam Mengembangkan Agenda Ekonomi Digital Pada Isu Konektivitas Digital Selama Masa Presidensi G20 Indonesia

Bab ini berisikan tentang gambaran mengenai sejarah forum G20 sejak awal pembentukannya dan peran Indonesia dalam forum G20 khususnya dalam mengembangkan agenda ekonomi digital yang membahas isu konektivitas digital selama masa Presidensi G20 2021-2022.

BAB V

Hasil dan Pencapaian Indonesia Terhadap Agenda Ekonomi Digital Pada Isu Konektivitas Digital dalam Presidensi G20 di Indonesia

Pada bab ini, akan berisikan penjelasan dan analisis terkait hasil dan pencapaian Indonesia terhadap pengembangan agenda ekonomi digital pada isu konektivitas digital dalam Presidensi G20 di Indonesia. Peneliti juga akan berusaha untuk melakukan analisis serta memberikan argumentatif terkait bagaimana peluang dari ekonomi digital di masa depan, khususnya di Indonesia.

BAB VI

Penutup

Bab ini berisikan penutup dari penelitian ini yakni kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh Peneliti.